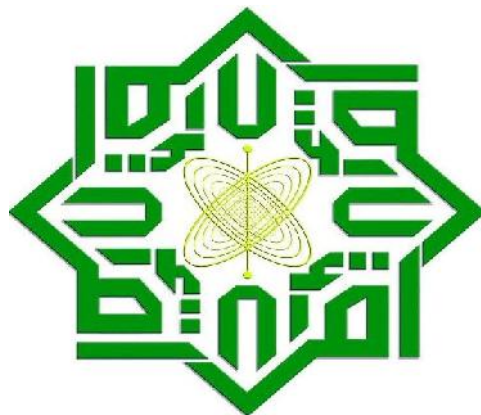


**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI
HONORER PEMERINTAH YANG DI ANGKAT PASCA KELUARNYA
PP NO.48/2005**

**Di Ajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

ADY ATMAN

NIM : 10927007572

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2014**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru – Riau No.TELP. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektorat@

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI HONORER PEMERINTAH YANG DIANGKAT PASCA KELUARNYA PP NO. 48/2005**” Yang ditulis oleh:

Nama : ADY ATMAN
NIM : 10927007572
Jurusan : ILMU HUKUM (HUKUM TATA NEGARA)

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Oktober 2014

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru 28 Oktober 2014

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

SEKRETARIS

Drs. Yusran Sabili, M. Ag
NIP. 19650318 199203 1 003

PENGUJI I

Hendri Saiful Anwar
NIP. 19760829 200312 1 003

PENGUJI II

Lysa Amranyani, SH, MH
NIP. 19790131 200604 2 003

ABSTRAK

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sekaligus memberikan larangan terhadap pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya setelah peraturan pemerintah itu keluar. Namun, dalam kenyataannya kemudian tetap terjadi pengangkatan tenaga honorer oleh berbagai instansi pemerintah, terutama di daerah. Larangan mengangkat tenaga honorer sebagaimana dimuat dalam PP No.48/2005 itu membuat tenaga honorer yang tetap diangkat tidak memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang jelas.

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini menetapkan dua masalah pokok, yaitu: Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer pemerintah dan Bagaimana implikasinya terhadap pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.

Untuk menjawab masalah tersebut, maka dilakukan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan memanfaatkan dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep.

Akhirnya dari penelitian ini disimpulkan bahwa tenaga honorer dan sejenisnya berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap pemerintah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang mana kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perlindungan hukum tenaga honorer dan sejenisnya terdiri dari perlindungan hukum dalam bidang publik dan perlindungan hukum dalam bidang keperdataan. Dalam bidang publik, terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, sedangkan perlindungan hukum represif ditempuh melalui peradilan administrasi/peradilan tata usaha negara. Dalam bidang keperdataan, ditempuh melalui peradilan umum. Kemudian Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku saat ini, pasca diangkatnya seluruh tenaga honorer yang diangkat sebelum tahun 2005 menjadi CPNS, tidak ada jaminan tenaga honorer yang diangkat setelah tahun 2005 akan diangkat secara otomatis menjadi CPNS.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan nikmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga kami bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI HONORER PEMERINTAH YANG DI ANGKAT PASCA KELUARNYA PP NO.48/2005”**. Yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu HUKUM Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa kajian ini belum sempurna, baik segi ilmiah maupun dalam susunan tatanan bahasanya, untuk itu segala kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini akan penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Teristimewa yakni ayahanda Mardan dan ibunda Nurhayati dan saudara saudaraku yang tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. DR. MUNZIR RITAMI, Selaku Rektor UIN Sultan Syarif kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya dikampus ini.

3. Yang terhormat Bapak DR. H. AKBARIZAN, MA.,MPd, selaku dekan fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau beserta ibu Dr. Hertina, MPd selaku Pembantu Dekan I, H. Mhd. KASTULANI, SH.,MH Selaku pembantu dekan II, Bapak. AHMAD DARBI B, MA. Selaku pembantu dekan III
4. Yang terhormat ibu NURAINI SAHU, SH.,MH Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Beserta stafnya.
5. Yang terhormat Bapak ASRIL, SHI.,MH, Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis
6. Yang terhormat Bapak AMRUL MUZAN, Mag, Selaku Penasehat Akademis.
7. Yang terhormat Bapak dan ibu dosen beserta staff Fakultas dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau
8. Kepada kakak-kakak dan teman-teman seperjuangan angkatan 2009.
9. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas seluruh bantuan dan budi baik yang telah di berikan kepada penulis selama ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Pekanbaru, 03 November 2014

Penulis

ADY ATMAN

NIM : 10927007572

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEGAWAIAN DI INDONESIA	
A. Sejarah Singkat Kepegawaian di Indonesia.....	19
B. Jenis dan Peranan Lembaga Pengelola Kepegawaian di Indonesia.....	26
BAB III TINJAUAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	
A. Sejarah Kelahiran Asas-asas Umum Pemerintahan yang bai.....	41
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia.....	43
BAB IV TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI HONORER PEMERINTAH YANG DIANGKAT PASCA KELUARNYA PP NO. 48/2005	
A. Kedudukan Hukum Pegawai Honoror.....	49
B. Perlindungan hukum Pegawai Honoror.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67